

KAJIAN DAMPAK PROGRAM PERKREDITAN DAN PERKUATAN PERMODALAN TERHADAP PEREKONOMIAN DAERAH (2002)

Selama ini UKM sudah banyak memperoleh kredit dari berbagai sumber yang digunakan sebagai modal kerja dan investasi. Hal ini terlihat antara lain dari kredit yang telah dikucurkan pemerintah melalui 17 skim kredit dengan persyaratan lunak. Dengan skim tersebut, telah dialokasikan dana sebesar Rp 1,0 triliun pada tahun 1997/1998 untuk kebutuhan UKM. Kemudian, pada tahun 1998/1999 alokasi dana yang diberikan kepada koperasi dan UKM meningkat empat belas kali lipat dari tahun sebelumnya dengan nilai Rp 14,4 triliun. Dalam pelaksanaannya, ternyata kredit tersebut belum dapat berjalan secara optimal karena diduga adanya hambatan dalam pengelolaan kredit, baik dalam penyaluran maupun dalam pengembalian pinjamannya.

Dari data di atas, jelas terlihat sudah begitu banyak kredit yang disalurkan kepada koperasi dan UKM, namun hingga saat ini belum ada kajian yang mempelajari dampak kredit itu terhadap perekonomian daerah, seperti: a) seberapa jauh dampak program perkreditan dan perkuatan permodalan terhadap perekonomian daerah; b) sampai seberapa jauh dampak program perkreditan dan perkuatan permodalan terhadap kinerja UKM; dan c) program perkreditan dan perkuatan permodalan apa saja yang sudah diterima koperasi dan UKM.

Berdasarkan masalah di atas, maka kajian ini bertujuan untuk: a) menganalisis dampak program perkreditan dan perkuatan permodalan terhadap perekonomian daerah; b) menganalisis kinerja UKM yang sudah menerima program perkreditan dan perkuatan permodalan; dan c) menganalisis jenis program perkreditan dan perkuatan permodalan UKM.

Dalam kajian ini dibutuhkan dua jenis data, yakni data primer dan data sekunder. Data primer dikumpulkan dengan menggunakan teknik wawancara langsung dengan berpedoman pada kuesioner yang sudah dipersiapkan lebih dulu. Data sekunder diperoleh dari publikasi-publikasi, laporan-laporan serta dokumen-dokumen yang diterbitkan instansi terkait. Data yang sudah terkumpul dianalisis dengan menggunakan regresi linier dan berganda serta analisis deskriptif. Lokasi kajian berada di sepuluh provinsi. Dari masing-masing provinsi dipilih satu kabupaten yang sudah memperoleh kredit dan perkuatan permodalan. Bantuan kredit umumnya diterima UKM dari bank setempat, seperti BRI, sedangkan perkuatan permodalan diperoleh dari BUMN/BUMD dan MAP yang dalam pengusulannya digunakan untuk usaha-usaha produktif.

Peruntukan kredit dan perkuatan permodalan pada umumnya digunakan untuk tiga jenis pembiayaan, yaitu pengadaan bahan baku, pengadaan peralatan, dan untuk gaji karyawan. Penggunaan kredit dan perkuatan permodalan untuk gaji merupakan tindakan yang menyimpang atau kurang tepat. Semakin besar dana yang digunakan untuk gaji karyawan, berarti semakin sedikit dana yang digunakan untuk meningkatkan usaha, akibatnya peluang peningkatan volume usaha dan pendapatan semakin berkurang.

Dalam kajian ini, hasil analisis menemukan bahwa pemberian kredit dan perkuatan permodalan ternyata berpengaruh positif terhadap volume usaha, yang berarti bahwa setiap penambahan bahan baku dan peralatan yang dibiayai dari kredit atau perkuatan permodalan dapat meningkatkan volume usaha. Dengan meningkatnya volume usaha, maka produksi barang dan jasa akan meningkat pula dan akan berpengaruh positif terhadap perekonomian daerah.

Kajian ini menyarankan agar: a) permodalan UKM ditingkatkan melalui program perkreditan dan perkuatan permodalan dengan syarat yang lunak dan mekanisme yang lebih cepat; b) perlu digalakkan pemberian legalitas usaha UKM dengan pendekatan aktivitas riil; c) dalam rangka peningkatan perekonomian daerah perlu digalakkan penyuluhan tentang perpajakan, retribusi, dan lain-lain kepada UKM agar mereka sadar atas kewajibannya sebagai wujud peransertanya dalam pembangunan daerah; dan d) pemberian kredit/bantuan perkuatan permodalan perlu ditingkatkan sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan produktivitas UKM yang diimbangi dengan pengawasan terhadap penggunaannya.